

Kinerja Keuangan Jawa Barat dan DKI Jakarta: Studi Komparatif Tahun 2020-2024

Nenda Marliani, Wulan Laelasari, Dwi Kartika Sari, Neng Riny Rahmawati

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM,

Jl. Belitung No.7 Kota Bandung

Email : nenda.marliani@stan-im.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan membandingkan kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi belanja. Data penelitian bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan komparatif. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis rasio, analisis tren, dan analisis komparatif rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah tinggi dengan pola delegatif, rata-rata rasio derajat desentralisasi sangat baik, rata-rata rasio efektivitas PAD cukup efektif, dan rata-rata rasio efisiensi belanja sudah efisien. Hasil perbandingan antara kedua daerah menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta lebih baik kinerja keuangannya dibandingkan Jawa Barat dari hasil kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi dan efisiensi belanja. Sedangkan Jawa Barat lebih baik dari DKI Jakarta dalam efektivitas pencapaian target Pendapatan Asli Daerah. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya Jawa Barat untuk mengoptimalkan potensi basis pajak baru guna meningkatkan kemandirian, sementara DKI Jakarta perlu meningkatkan akurasi perencanaan target pendapatan agar lebih efektif. Kontribusi penelitian ini memberikan kerangka evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adaptif.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and compare the financial performance of West Java Province and DKI Jakarta based on the local financial autonomy ratio, the degree of decentralisation ratio, the local revenue effectiveness ratio, and the expenditure efficiency ratio. The research data was sourced from the Budget Implementation Reports of West Java Province and DKI Jakarta. This study employs a quantitative approach using descriptive and comparative analysis methods. Data analysis techniques include ratio analysis, trend analysis, and comparative analysis of averages. The results indicate that West Java Province and DKI Jakarta have high average local financial autonomy ratios with a delegative pattern, very good average decentralisation ratios, fairly effective average PAD effectiveness ratios, and efficient average expenditure efficiency ratios. A comparison between the two regions indicates that DKI Jakarta performs better financially than West Java in terms of local financial autonomy, the degree of decentralisation, and expenditure efficiency. Meanwhile, West Java outperforms DKI

Jakarta in the effectiveness of achieving Local Own-Source Revenue (PAD) targets. The implications of this research emphasise the need for West Java to optimise the potential of new tax bases to enhance financial autonomy, whilst DKI Jakarta needs to improve the accuracy of revenue target planning to make it more effective. The findings of this study provide a framework for local governments to formulate more adaptive fiscal policies.

Keywords: *Financial Performance, Independence Ratio, Degree of Decentralisation Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Expenditure Efficiency Ratio.*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah adalah pihak yang diberikan wewenang dalam menjalankan aktivitas pemerintahan di daerah (Yanto & Kusumawardani, 2024). Dalam perspektif teori keagenan, Pemerintah Daerah bertindak sebagai agen yang dipercaya mengelola sumber daya publik. Pihak prinsipalnya adalah rakyat, yang diwakili oleh DPRD untuk melakukan pengawasan. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan daerahnya (Deborah & Mangantar, 2020). Masyarakat ingin pemerintah daerah memberikan informasi yang jelas tentang kinerja keuangannya (Widodo et al, 2025). Laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai alat analisis kinerja keuangan dari daerah tersebut.

Kinerja keuangan adalah pencapaian dari target keuangan yang dapat diukur melalui indikator tertentu (Marliani, 2022). Kinerja keuangan pemerintah daerah bermanfaat untuk melihat kesehatan struktur keuangan, serta kemandirian daerah (Najla & Fahlevi, 2023). Salah satu cara pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah membandingkan anggaran dengan realisasi APBD (Remanta & Ramadhan, 2024). APBD merupakan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan daerah (Toamain et al, 2025). Di dalam APBD berisi tentang pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dalam satu pemerintahan daerah (Rafsanjani & Sumiati, 2024).

Penelitian ini akan membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kedua provinsi ini merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Kedua provinsi merupakan pusat ekonomi di Pulau Jawa yang secara kolektif menyumbang konsentrasi ekonomi terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 4.90% dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat sebesar 4.95%. Kedua provinsi memiliki

laju pertumbuhan ekonomi yang berdekatan. Meskipun pertumbuhan ekonomi keduanya bersaing ketat, DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki lanskap fiskal yang berbeda; Jakarta dengan kemandirian fiskal yang mapan sebagai pusat bisnis, sementara Jawa Barat menghadapi tantangan manajemen keuangan dengan tekanan demografi penduduk terbesar di Indonesia.

Laju pertumbuhan ekonomi daerah sangat erat keterkaitannya dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah Daerah memiliki potensi besar dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui pendapatan asli daerah (Sembiring et al, 2025). Namun belum semua daerah memiliki kemandirian fiskal, sehingga masih tergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Berikut tabel yang menunjukan besarnya komposisi sumber pendapatan daerah antara Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta:

Tabel 1. Komposisi Pendapatan Daerah

Tahun	Nama Daerah	Komposisi Pendapatan Daerah		
		Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
2022	Jabar	69.95%	29.76%	0.29%
	DKI Jakarta	67.78%	28.03%	4.19%
2023	Jabar	70.10%	29.57%	0.33%
	DKI Jakarta	69.15%	28.37%	2.48%
2024	Jabar	69.00%	30.94%	0.06%
	DKI Jakarta	69.55%	29.64%	0.81%

Sumber: data LKPD Jabar dan DKI Jakarta (diolah, 2025)

Berdasarkan tabel diatas pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta didominasi oleh pendapatan asli daerah. Kedua daerah tersebut tidak tergantung pada transfer pemerintah pusat. Komposisi PAD DKI Jakarta sempat turun di tahun 2023, naik kembali di tahun 2024. Berbeda dengan Jawa Barat yang mengalami kenaikan komposisi PAD di tahun 2023, namun mengalami penurunan di tahun 2024. Penelitian ini akan menganalisis perbandingan kinerja keuangan kedua daerah yang dilihat dari akun-akun yang ada pada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran berisi informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja (Widodo et al, 2025). Rasio keuangan yang digunakan untuk melakukan analisis akun-akun di LRA adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat

desentralisasi, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi belanja. Pemilihan rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio efektivitas PAD dipilih untuk menilai ketajaman perencanaan anggaran dan kemampuan pencapaian target pendapatan. Rasio efisiensi belanja digunakan sebagai indikator untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar efisien dan tepat sasaran.

Penelitian sebelumnya terkait penelitian ini pernah dilakukan. Penelitian Setiani & Sarwono (2025) membandingkan kinerja keuangan Provinsi di Pulau Jawa dan Kalimantan memperoleh hasil bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio ketergantungan daerah dan derajat desentralisasi lebih baik Provinsi di pulau Jawa dibandingkan dengan Provinsi di pulau Kalimantan. Putri et al (2025) melakukan analisis kinerja keuangan provinsi di pulau Sumatera, berdasarkan rasio efisiensi, rata-rata mengindikasikan kinerja cukup efisien, meskipun beberapa provinsi masih menunjukkan efisiensi rendah. Penelitian Restiana et al (2024) rasio efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tebo lebih efektif dibanding dengan Kota Jambi. Meskipun penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah banyak dilakukan, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Penelitian terdahulu cenderung melakukan perbandingan kinerja dengan pemetaan luas antar pulau atau antar kabupaten yang secara ekonomi tidak setara, sehingga generalisasi hasilnya kurang tajam. Penelitian ini secara khusus melakukan studi komparatif pada dua provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang hampir sama. Hal ini penting untuk melihat apakah keunggulan kapasitas fiskal yang dimiliki DKI Jakarta secara otomatis mencerminkan efisiensi belanja yang lebih baik dibandingkan Jawa Barat yang memiliki tantangan jumlah populasi lebih besar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta berdasarkan: 1) rasio kemandirian keuangan daerah, 2) rasio derajat desentralisasi, 3) rasio efektivitas pendapatan asli daerah, 4) rasio efisiensi belanja.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan capaian kinerja keuangan masing-masing provinsi. Sementara itu, metode komparatif diterapkan untuk mengevaluasi perbedaan kinerja keuangan antara Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam kurun waktu 2020-2024. Data penelitian bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta tahun 2020-2024. Data diperoleh dari website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat <https://bpkad.jabarprov.go.id/> dan website resmi DKI Jakarta <https://ppid.jakarta.go.id/>. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama:

1. Analisis Rasio: Menghitung nilai rasio kemandirian, derajat desentralisasi, efektivitas PAD, dan efisiensi belanja setiap tahunnya.
2. Analisis Tren: Memetakan fluktuasi kinerja keuangan dari tahun ke tahun untuk melihat pola pertumbuhan atau penurunan performa selama periode penelitian.
3. Analisis Komparatif Rata-Rata (*Mean Comparison*): Membandingkan nilai rata-rata dari masing-masing rasio antara kedua daerah. Menentukan daerah mana yang memiliki kinerja lebih unggul secara statistik.

Analisis rasio keuangan yang digunakan terdiri dari:

- a). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
>25% - 50%	Rendah	Konsultatif
>50% - 75%	Sedang	Partisipatif
>75% - 100%	Tinggi	Delegatif

- b). Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

c). Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Rasio Efektivitas PAD

Nilai Rasio Efektivitas PAD (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

d). Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Terjadi efisiensi belanja jika realisasi belanja kurang dari 100%

(Mahmudi, 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

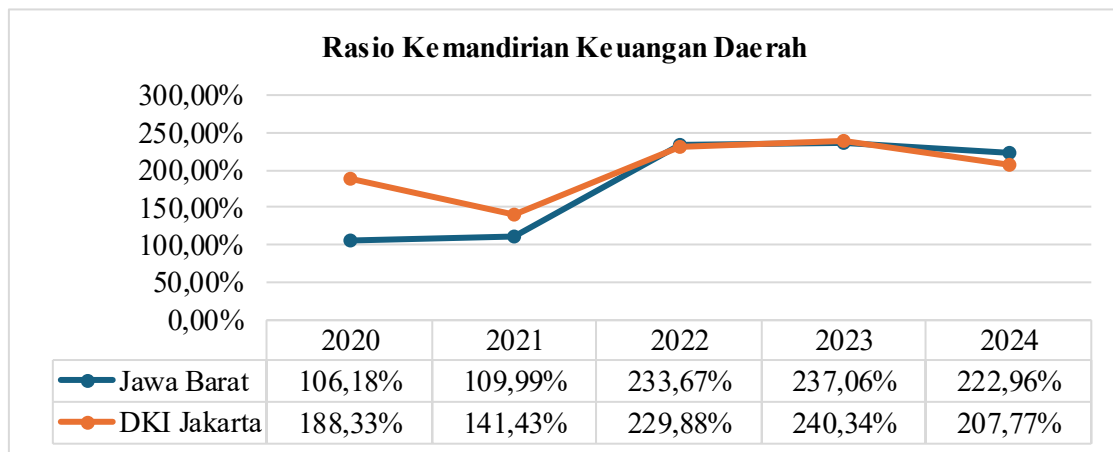
Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerahnya. Rasio ini juga menunjukkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (Irwan, 2025). Semakin tinggi rasio ini maka ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Tabel 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat & DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Provinsi Jawa Barat		DKI Jakarta		Rasio Tertinggi
	Rasio	Kriteria & Pola Hubungan	Rasio	Kriteria & Pola Hubungan	
2020	106,18%	Tinggi/Delegatif	188,33%	Tinggi/Delegatif	DKI Jakarta
2021	109,99%	Tinggi/Delegatif	141,43%	Tinggi/Delegatif	DKI Jakarta
2022	233,67%	Tinggi/Delegatif	229,88%	Tinggi/Delegatif	Jawa Barat
2023	237,06%	Tinggi/Delegatif	240,34%	Tinggi/Delegatif	DKI Jakarta
2024	222,96%	Tinggi/Delegatif	207,77%	Tinggi/Delegatif	Jawa Barat
Rata-Rata	181,97%	Tinggi/Delegatif	201,55%	Tinggi/Delegatif	DKI Jakarta

Sumber: Data sekunder, diolah (2026)



Gambar 1: Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat & DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel 5 dan gambar 1, rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta berfluktuasi. Rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan di tahun 2021-2023, namun terjadi penurunan di tahun 2024. Sedangkan untuk Provinsi DKI Jakarta, rasio kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2024, kenaikan rasio terjadi di tahun 2022 dan 2023. Jawa Barat menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil pada periode 2021-2023, bahkan secara komparatif tahunan, Jawa Barat berhasil melampaui DKI Jakarta pada tahun 2022 (233,67%) dan 2024 (222,96%). Sebaliknya, DKI Jakarta mengalami penurunan efektivitas kemandirian pada tahun 2021 dan 2024. Secara komparatif, DKI Jakarta unggul pada awal periode (2020-2021) karena struktur ekonominya yang berbasis jasa dan perkantoran mampu melakukan digitalisasi pajak lebih cepat saat pembatasan mobilitas terjadi. Pada tahun 2022 dan 2024 Jawa Barat (233,67% dan

222,96%) berhasil melampaui DKI Jakarta. Secara analitis, hal ini dipicu oleh keberhasilan Jawa Barat dalam melakukan intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui program pemutihan dan inovasi digital.

Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Barat 181,97%, berada pada kriteria tinggi dan pola hubungan yang terjadi adalah delegatif. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta adalah 201,55%, tingkat kemandiriannya tinggi, polanya delegatif. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Komposisi pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah lebih tinggi dibandingkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan dana pinjaman. Secara kumulatif, Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kemandirian lebih tinggi dengan rata-rata 201,55% dibandingkan Jawa Barat sebesar 181,97%. Terdapat selisih rata-rata sebesar 19,58%, yang menunjukkan bahwa sebagai pusat bisnis nasional, DKI Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang lebih solid dalam menopang pengeluaran daerahnya tanpa bergantung pada bantuan pusat. DKI Jakarta saat ini merupakan Ibukota Negara dan sekaligus pusat perekonomian dan bisnis dimana tentunya akan mendapatkan PAD yang cukup tinggi dibandingkan daerah yang lain. Keunggulan rata-rata DKI Jakarta dipicu oleh konsentrasi pajak daerah dari sektor jasa dan perkantoran yang masif. Namun, keberhasilan Jawa Barat melampaui Jakarta di tahun 2024 menunjukkan adanya akselerasi optimalisasi PAD di Jawa Barat yang lebih progresif, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor dan upaya digitalisasi pendapatan daerah.

Dalam perspektif Teori Keagenan, capaian pola hubungan delegatif pada kedua daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah (agen) telah menunjukkan performa yang sangat akuntabel kepada masyarakat (prinsipal). Temuan ini mendukung penelitian Sembiring et al (2025) yang menyatakan bahwa daerah dengan basis ekonomi kuat di Pulau Jawa memiliki potensi besar dalam memperkuat kemandirian fiskal. Namun, hasil penelitian ini memberikan temuan baru yang mengoreksi anggapan umum bahwa DKI Jakarta selalu menjadi yang tertinggi. Data 2022 dan 2024 menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah di Jawa Barat mampu menyaingi DKI Jakarta.

Implikasi dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian yang sangat tinggi (pola delegatif) memberikan ruang bagi Jawa Barat dan DKI Jakarta

untuk menjadi *trendsetter* dalam kebijakan inovatif, seperti subsidi transportasi publik atau jaminan sosial daerah yang lebih luas. Selisih rata-rata 19,58% antara kedua daerah menunjukkan bahwa DKI Jakarta tetap memiliki bantalan fiskal yang lebih tebal. Implikasinya bagi Jawa Barat adalah perlunya menjaga stabilitas PAD dari sektor manufaktur dan kendaraan.

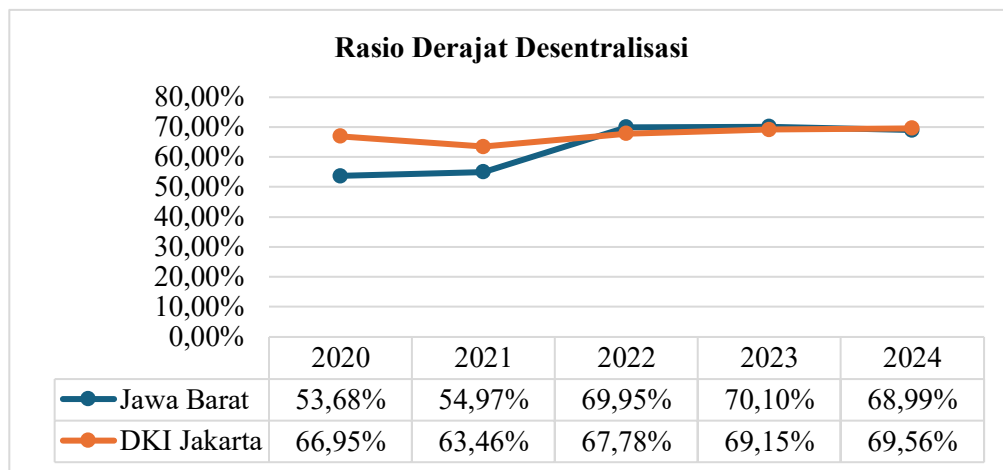
Hasil Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi mengukur kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio derajat desentralisasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mampu dalam menjalankan pemerintahan secara mandiri dan menjalankan fungsi desentralisasi (Putri et al, 2025).

Tabel 6. Rasio Derajat Desentralisasi Provinsi Jawa Barat & DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Provinsi Jawa Barat		DKI Jakarta		Rasio Tertinggi
	Rasio	Kriteria	Rasio	Kriteria	
2020	53,68%	Sangat Baik	66,95%	Sangat Baik	DKI Jakarta
2021	54,97%	Sangat Baik	63,46%	Sangat Baik	DKI Jakarta
2022	69,95%	Sangat Baik	67,78%	Sangat Baik	Jawa Barat
2023	70,10%	Sangat Baik	69,15%	Sangat Baik	Jawa Barat
2024	68,99%	Sangat Baik	69,56%	Sangat Baik	DKI Jakarta
Rata-Rata	63,54%	Sangat Baik	67,38%	Sangat Baik	DKI Jakarta

Sumber: Data sekunder, diolah (2026)



Gambar 2: Grafik Rasio Derajat Desentralisasi Provinsi Jawa Barat & DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel 6 dan gambar 2, rasio derajat desentralisasi Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta selama tahun 2020-2024 berada diatas 50%, hal ini menunjukkan bahwa

kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah lebih dari 50%, lebih dari setengah total Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Menarik untuk dicermati melalui analisis tren bahwa Jawa Barat mengalami lonjakan drastis pada tahun 2022 (dari 54,97% ke 69,95%) dan berhasil mempertahankan posisi di atas 68% hingga 2024. Lonjakan ini mengindikasikan adanya reformasi birokrasi dan intensifikasi pajak daerah pasca-pandemi, di mana Jawa Barat mulai mampu mengimbangi dominasi DKI Jakarta dalam hal komposisi PAD.

Rata-rata rasio derajat desentralisasi Provinsi Jawa Barat 63,54%. Maka kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah adalah 63,54%. Kriteria derajat desentralisasi sangat baik. Rata-rata rasio derajat desentralisasi Provinsi DKI Jakarta 67,38%, daerah sudah sangat baik dalam penyelenggaraan desentralisasi. Secara analitis temuan ini menunjukkan bahwa kedua provinsi sudah tidak tergantung dengan Pemerintah Pusat. Apabila dibandingkan, rata-rata rasio derajat desentralisasi Provinsi DKI Jakarta lebih tinggi dari Jawa Barat. Sehingga Provinsi DKI Jakarta memiliki proporsi PAD terhadap total pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat. Perbedaan tipis rata-rata rasio ini dipengaruhi oleh faktor karakteristik wilayah. DKI Jakarta memiliki keunggulan sebagai pusat bisnis nasional dengan basis pajak yang terkonsentrasi pada Pajak Restoran, Hotel, dan Parkir yang bersifat sangat likuid. Jawa Barat memiliki basis pajak yang lebih luas dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seiring dengan jumlah populasi kendaraan yang sangat besar. Keberhasilan Jawa Barat melampaui Jakarta pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa strategi digitalisasi pajak (seperti aplikasi Sambara) terbukti efektif meningkatkan *compliance* wajib pajak di wilayah yang luas.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori keagenan, di mana pemerintah daerah sebagai agen telah menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat (prinsipal) dengan mengoptimalkan sumber daya internal daerah. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Setiani & Sarwono (2025) yang menyatakan bahwa provinsi di Pulau Jawa cenderung memiliki derajat desentralisasi yang lebih kuat dibandingkan wilayah lain karena infrastruktur ekonomi yang sudah mapan. Namun, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa Jawa Barat kini mampu bersaing dengan DKI Jakarta, skala ekonomi Jawa Barat mulai mencapai titik kemandirian yang setara dengan ibukota.

Temuan ini memberikan implikasi strategis bagi kebijakan fiskal ke depan. Dengan derajat desentralisasi yang sangat baik, kedua daerah memiliki keleluasaan lebih besar untuk menentukan program prioritas (seperti pembangunan infrastruktur mandiri) tanpa perlu menunggu persetujuan anggaran transfer dari pusat. Karena sangat bergantung pada PAD, kedua daerah menjadi sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi lokal. Pemerintah daerah harus menyiapkan dana cadangan fiskal (*fiscal buffer*) untuk menjaga stabilitas belanja jika terjadi penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada setoran pajak.

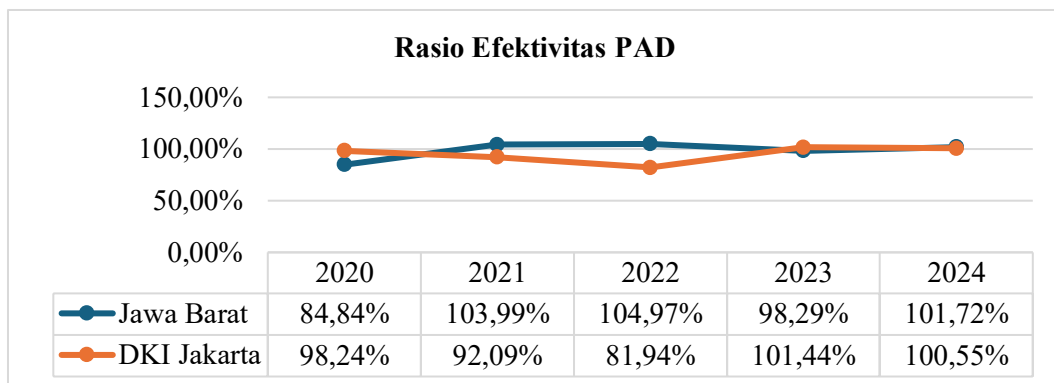
Hasil Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target perolehan pendapatan asli daerah yang sudah ditetapkan (Amal & Wibowo, 2022). Semakin tinggi rasio ini artinya semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah.

Tabel 7. Rasio Efektivitas PAD Provinsi Jawa Barat & DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Provinsi Jawa Barat		DKI Jakarta		Rasio Tertinggi
	Rasio	Kriteria	Rasio	Kriteria	
2020	84,84%	Kurang Efektif	98,24%	Cukup Efektif	DKI Jakarta
2021	103,99%	Sangat Efektif	92,09%	Cukup Efektif	Jawa Barat
2022	104,97%	Sangat Efektif	81,94%	Kurang Efektif	Jawa Barat
2023	98,29%	Cukup Efektif	101,44%	Sangat Efektif	DKI Jakarta
2024	101,72%	Sangat Efektif	100,55%	Sangat Efektif	Jawa Barat
Rata-Rata	98,76%	Cukup Efektif	94,85%	Cukup Efektif	Jawa Barat

Sumber: Data sekunder, diolah (2026)



Gambar 3: Grafik Rasio Efektivitas PAD Provinsi Jawa Barat & DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel 7 dan gambar 3, selama tahun 2020-2024, Provinsi Jawa Barat mampu mencapai rasio efektivitas PAD yang lebih dari 100% pada tahun 2021, 2022, dan 2024. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2023 rasio efektivitas PAD kurang dari 100%. Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020, 2021, 2022 efektivitas PAD masih kurang dari 100%, sedangkan rasio efektivitas PAD yang lebih dari 100% terjadi di tahun 2023 dan 2024. Pada saat rasio efektivitas PAD lebih dari 100%, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah sangat efektif dalam pencapaian penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan/dianggarkan.

Terdapat temuan menarik di mana Jawa Barat secara rata-rata mengungguli DKI Jakarta. Rata-rata rasio efektivitas PAD Provinsi Jawa Barat adalah 98,76 % masuk kategori cukup efektif, rata-rata rasio efektivitas PAD Provinsi DKI Jakarta yaitu 94,85%, termasuk kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki akurasi perencanaan pendapatan yang lebih realistis dan kemampuan eksekusi yang lebih baik. Pemerintah Jawa Barat lebih mampu dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah yang sudah ditetapkan. Secara analitis, keunggulan Jawa Barat ini dipicu oleh sistem intensifikasi pajak berbasis data digital yang mampu memetakan potensi wajib pajak secara akurat hingga ke tingkat desa. Sementara itu, DKI Jakarta cenderung mengalami *underperformance* pada 2020-2022 karena target yang dipasang seringkali terlalu optimistis (ambisius) di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil, sehingga realisasinya sulit mencapai angka 100%.

Hasil ini memperkuat Teori Keagenan, di mana pemerintah Jawa Barat sebagai agen menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap kontrak anggaran yang telah disepakati dengan DPRD dan rakyat (prinsipal). Keberhasilan mencapai target di atas 100% pada tiga tahun berbeda mencerminkan rendahnya *information asymmetry* antara eksekutif dan legislatif terkait potensi pajak daerah. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Restiana et al (2024) yang menemukan bahwa daerah dengan APBD besar cenderung lebih efektif. Dalam kasus ini, DKI Jakarta yang memiliki APBD jauh lebih besar justru kalah efektif dibanding Jawa Barat. Hal ini membuktikan bahwa kapasitas fiskal yang besar tidak menjamin efektivitas pencapaian target jika tidak disertai dengan presisi perencanaan anggaran (*budgetary precision*).

Rasio efektivitas yang tinggi di Jawa Barat bukan hanya sekadar angka, melainkan memiliki implikasi nyata. Jawa Barat memiliki kredibilitas anggaran yang

lebih baik karena program pembangunan yang direncanakan dapat didanai dengan kepastian arus kas dari PAD yang terealisasi sesuai harapan. DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi terhadap proses penetapan target pendapatannya. Target yang terlalu tinggi (*over estimasi*) namun tidak terealisasi berisiko menyebabkan pembatalan program pembangunan di tengah jalan karena kekurangan dana (*shortfall*).

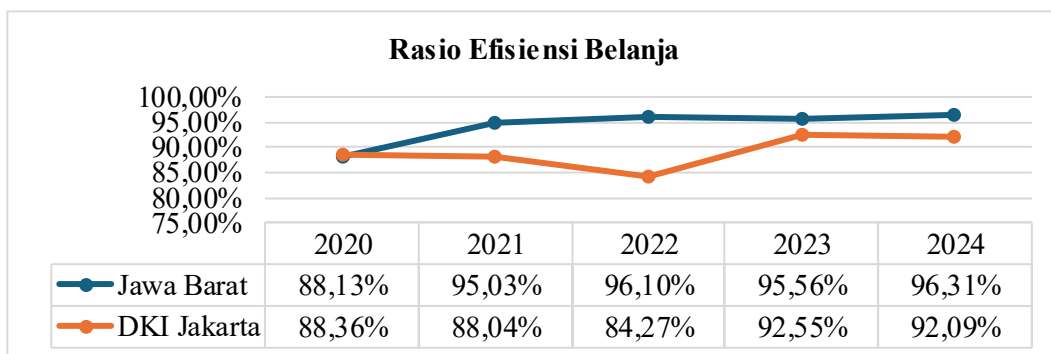
Hasil Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja membandingkan antara anggaran belanja dan realisasi belanja pada satu tahun anggaran (Karina & Wibowo, 2022). Rasio ini digunakan untuk menghitung tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah dinilai telah melakukan efisiensi jika hasil rasio nya kurang dari 100%.

Tabel 8. Rasio Efisiensi Belanja Provinsi Jawa Barat & DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Provinsi Jawa Barat		DKI Jakarta		Rasio Terefisien
	Rasio	Kriteria	Rasio	Kriteria	
2020	88,13%	Efisien	88,36%	Efisien	Jawa Barat
2021	95,03%	Efisien	88,04%	Efisien	DKI Jakarta
2022	96,10%	Efisien	84,27%	Efisien	DKI Jakarta
2023	95,56%	Efisien	92,55%	Efisien	DKI Jakarta
2024	96,31%	Efisien	92,09%	Efisien	DKI Jakarta
Rata-Rata	94,23%	Efisien	89,06%	Efisien	DKI Jakarta

Sumber: Data sekunder, diolah (2026)



Gambar 4: Grafik Rasio Efisiensi Belanja Provinsi Jawa Barat & DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel 8 dan gambar 4, rasio efisiensi belanja Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta selama tahun 2020-2024 berada dibawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 kedua daerah tersebut dinilai telah melakukan efisiensi

anggaran belanja. Rata-rata rasio efisiensi belanja Provinsi Jawa Barat adalah 94,23% hal ini menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi belanja Provinsi Jawa Barat adalah 5,77%. Rata-rata rasio efisiensi belanja Provinsi DKI Jakarta adalah 89,06%, maka rata-rata efisiensi belanja sebesar 10,94%. Jika dibandingkan efisiensi belanja yang dilakukan Provinsi DKI Jakarta lebih tinggi dari Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta lebih efisien dalam melakukan pengelolaan anggaran belanja dibandingkan dengan Jawa Barat.

Kedua Provinsi mencatat tingkat efisiensi tertinggi di awal periode (88%). Secara kritis, hal ini dipicu oleh kebijakan *refocussing* anggaran akibat pandemi COVID-19, di mana banyak kegiatan fisik yang dibatalkan atau dialihkan menjadi belanja darurat yang lebih terkontrol. Memasuki 2021-2024, Jawa Barat menunjukkan rasio yang mendekati 100% (95-96%). Hal ini mengindikasikan bahwa Jawa Barat lebih ekspansif dalam mengeksekusi anggaran untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, DKI Jakarta mampu menjaga rasio tetap stabil di angka 80-92%, yang mencerminkan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang cukup besar, baik karena penghematan biaya tender maupun kendala dalam eksekusi proyek besar yang kompleks di wilayah perkotaan.

Temuan ini memperkuat Teori Keagenan, di mana pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang berupaya meminimalkan *moral hazard* berupa pemborosan anggaran untuk membuktikan akuntabilitasnya kepada masyarakat (prinsipal). Kemampuan menjaga rasio di bawah 100% menunjukkan bahwa agen memiliki kendali internal yang baik atas belanja operasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Putri et al (2025) yang menyatakan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa cenderung memiliki sistem pengawasan internal yang lebih mapan, sehingga risiko kebocoran anggaran dapat ditekan. Namun, angka efisiensi DKI Jakarta yang jauh lebih rendah (lebih hemat) juga bisa diinterpretasikan sebagai risiko *underspending* jika penghematan tersebut berasal dari program-program pelayanan publik yang tidak tereksekusi secara maksimal.

Efisiensi yang tinggi membawa implikasi strategis pada struktur keuangan daerah. Efisiensi anggaran bertindak sebagai cadangan fiskal (*fiscal buffer*) yang kokoh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi makro di masa depan. Bagi Jawa Barat, rasio yang mendekati 100% menunjukkan penyerapan anggaran yang lebih tinggi, yang secara makro dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal lebih cepat. Bagi DKI Jakarta,

tingkat penghematan yang mencapai 10,94% (selisih realisasi dan anggaran) memberikan ruang fiskal yang luas untuk investasi di tahun berikutnya, namun perlu diwaspadai agar tidak menurunkan kualitas layanan dasar masyarakat. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara efisiensi (penghematan) dengan efektivitas (capaian hasil) agar penghematan tidak mengorbankan target pembangunan jangka panjang yang telah disepakati.

4. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perbandingan kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta tahun 2020-2024, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta telah mencapai kemandirian keuangan yang tinggi dengan pola hubungan delegatif dan derajat desentralisasi yang sangat baik. Secara teknis, ini bermakna kedua daerah memiliki kemampuan dalam menentukan arah pembangunan tanpa intervensi fiskal yang dominan dari pemerintah pusat.
2. Kedua daerah mampu mengelola pengeluaran secara efisien (di bawah 100%). Hal ini mengindikasikan komitmen agen (Pemerintah Daerah) dalam menjaga disiplin anggaran dan mencegah pemborosan, yang merupakan bentuk tanggung jawab kepada prinsipal (masyarakat).
3. DKI Jakarta unggul dalam kapasitas fiskal (kemandirian dan desentralisasi) serta efisiensi belanja. Hal ini menegaskan posisinya sebagai pusat gravitasi ekonomi nasional dengan bantalan fiskal yang kuat.
4. Jawa Barat mengungguli DKI Jakarta dalam efektivitas realisasi PAD. Ini menginterpretasikan bahwa Jawa Barat memiliki akurasi perencanaan anggaran yang lebih presisi dan sistem eksekusi yang lebih tajam dalam memungut potensi daerahnya dibandingkan DKI Jakarta.
5. Kapasitas fiskal yang besar (DKI Jakarta) tidak selalu menjamin presisi perencanaan (efektivitas), sedangkan tantangan geografis dan populasi (Jawa Barat) dapat diatasi melalui manajemen target yang realistis dan inovatif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, berikut adalah saran-saran yang dapat diajukan:

1. Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan akurasi perencanaan target PAD. Pastikan target realistis, terukur, dan didasari oleh data potensi ekonomi riil, bukan sekadar proyeksi optimistis yang sulit dicapai, hal ini guna meningkatkan rasio efektivitas PAD. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem proyeksi pendapatan dapat dilakukan dengan menerapkan metode prakiraan berbasis data riil (*data-driven forecasting*).
2. Meskipun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sudah sangat baik, Provinsi Jawa Barat masih perlu meningkatkan total PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah. Selain itu, optimalisasi aset daerah (*asset leverage*) yang menganggur untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga dapat menjadi sumber PAD baru untuk mengimbangi beban belanja penduduk yang besar.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Politeknik Keuangan Negara STAN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(1), 83–93.
- Deborah, P. J., & Mangantar, M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal EMBA*, 8(1), 292–301.
- Irwan, I. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 444–450.
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 14(2), 146–167. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Marliani, N. (2022). Anaisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(1), 11–20.
- Najla, M., & Fahlevi, H. (2023). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 73–86.
- Putri, F. S., Mustika, R., & Heriyanto, R. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi*

Manajemen Bisnis Dan Akuntansi, 2(5), 1–11.

Rafsanjani, M., & Sumiati, S. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Management Risiko Dan Keuangan*, 3(4), 395–408.

Remanta, O., & Ramadhan, P. R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Manajemen (JASMIEN)*, 05(04), 457–465.

Restiana, R., Isma, A., & Prasaja, A. S. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Jambi Dan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2018 -2022. *EBISMA:EBisnis Manajemen*, 2(1), 8–24.

Sembiring, R. T., Mustika, I. G., & Helmi, S. M. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. *JIMEA-Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(2), 2862–2873.

Setiani, N., & Sarwono, A. E. (2025). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan Tahun Anggaran 2024. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 14(2), 999–1007.

Toamain, A. S., Siaila, S., & Pattiruhu, J. R. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Maluku Tenggara. *Journal of Accounting And Finance Management*, 6(4), 2294–2303.

Widodo, A. A., Riyanti, D. A., Dani, F. R., Abdillah, M. E., & Siboro, S. F. (2025). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023 Anggaran. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 3(5), 319–329.

Yanto, D., & Kusumawardani, M. (2024). Kinerja Keuangan Pemerintah Dki Jakarta Dan Jawa Barat: Dampak Pandemi Covid 19. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 8(2), 427–439.